

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah kajian yang memuat teori-teori dan metode penelitian yang berfungsi untuk membantu merumuskan masalah guna menghasilkan hasil penelitian. Tinjauan ini mencakup teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung dan menjadi dasar dalam penelitian terkait preferensi masyarakat terhadap pusat perbelanjaan.

2.1 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

PKSN adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan strategis yang mendukung pembangunan nasional, terutama di daerah perbatasan. PKSN memiliki beberapa kriteria penting, antara lain:

- **Pintu Gerbang Internasional:** Kawasan ini juga berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan negara lain.
- **Simpul Utama Transportasi:** PKSN harus menjadi simpul transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, sehingga memudahkan pergerakan barang dan orang.
- **Pusat Pertumbuhan Ekonomi:** PKSN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya melalui aktivitas perdagangan.

PKSN memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan wilayah, terutama di daerah perbatasan. Menurut analisis dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), PKSN berfungsi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengembangan PKSN, diharapkan dapat tercipta pusat-pusat kegiatan ekonomi yang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. PKSN tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga sosial. Dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, masyarakat lokal dapat merasakan manfaatnya melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, tantangan seperti penyelundupan barang dan ketidakpastian hukum juga perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat berkelanjutan. Secara keseluruhan, PKSN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dengan memenuhi kriteria sebagai pos pemeriksaan lintas batas, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, dan pusat pertumbuhan ekonomi, PKSN dapat menjadi motor penggerak bagi perkembangan ekonomi lokal dan integrasi regional.

2.2 Tujuan dan Fungsi PKSN

Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan strategis di wilayah perbatasan negara yang ditetapkan pemerintah sebagai pusat pengembangan ekonomi, pertahanan, dan pelayanan publik. Menurut Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014, tujuan utama pengembangan PKSN adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal, memperkuat ketahanan dan keamanan negara wilayah perbatasan, serta menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat di daerah terluar. Fungsi PKSN diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa lintas batas, pusat distribusi barang antarnegara, serta pusat pelayanan sosial dan administrasi pemerintahan.

Secara teoritis, Tarigan (2005) menegaskan bahwa kawasan pusat pertumbuhan seperti PKSN berfungsi untuk mendorong aktivitas ekonomi regional, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta menjadi simpul distribusi aktivitas perdagangan dan jasa di wilayah sekitarnya. Sementara itu, Purnomo (2012) menyatakan bahwa pengembangan PKSN memiliki dua tujuan strategis, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan geopolitik. Dari sisi ekonomis, PKSN diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas, menarik investasi, dan mengembangkan sektor jasa di kawasan perbatasan. Dari sisi geopolitik, PKSN berperan penting dalam memperkuat posisi strategis negara di kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Dengan demikian, pengembangan PKSN tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam strategi nasional untuk memperkuat pertahanan dan pemerataan pembangunan di kawasan tertinggal.

2.3 Kriteria Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Aspek penetapan sebuah wilayah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008:

1. Kawasan perkotaan yang memiliki potensi sebagai titik pemeriksaan batas antarnegara. Wilayah perkotaan yang berpotensi difungsikan sebagai lokasi resmi pemeriksaan lintas batas antar Indonesia dan negara tetangga
2. Wilayah perbatasan yang berperan sebagai akses utama masuk dan keluar antarnegara. Area yang ditetapkan sebagai pintu gerbang resmi hubungan internasional, seperti pos perbatasan atau terminal lintas negara
3. Kota yang memiliki fungsi sebagai penghubung internasional dengan negara lain. Kawasan perkotaan yang berperan strategis sebagai jalur utama konektivitas internasional, misalnya melalui pelabuhan atau bandara yang berada di wilayah perbatasan

4. Kota yang menjadi simpul transportasi utama bagi kawasan sekitarnya. Wilayah yang berfungsi sebagai titik strategis jaringan transportasi darat, laut, atau udara, serta melayani aktivitas mobilitas regional
5. Kawasan perkotaan yang mendorong pertumbuhan regional. Wilayah dengan kekuatan ekonomi yang mampu mendorong pembangunan di wilayah sekitarnya melalui sektor industri, perdagangan, jasa, atau aktivitas ekonomi lainnya.

Wilayah yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung konektivitas antarnegara, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi wilayah. PKSN ditetapkan pada kawasan yang memiliki posisi geografis, ekonomi, dan logistik yang strategis, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional di wilayah perbatasan.

2.4 Optimalisasi Wilayah PKSN

Optimalisasi secara umum diartikan sebagai suatu upaya untuk memaksimalkan fungsi, peran, atau potensi suatu objek agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan efisien (Tjiptono, 2015). Dalam konteks perencanaan wilayah, optimalisasi diartikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Putra, 2018). Menurut Sutami (2020), optimalisasi peran suatu kota sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) melibatkan pemanfaatan sektor unggulan daerah, penguatan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan. Hal ini dilakukan agar kota tersebut dapat berfungsi maksimal sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat distribusi barang dan jasa, serta pintu gerbang kegiatan lintas batas negara.

Adapun dalam konteks Kota Atambua sebagai PKSN, optimalisasi diartikan sebagai upaya mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, memperkuat fungsi pelayanan perbatasan, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi dan logistik. Optimalisasi ini bertujuan agar Kota Atambua mampu menjalankan perannya sebagai pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, sekaligus sebagai penghubung strategis dengan negara tetangga Timor Leste (Kementerian PUPR, 2021). Dengan demikian, optimalisasi dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian langkah yang dirancang untuk memaksimalkan peran strategis Kota Atambua dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, melalui pemanfaatan sektor-sektor unggulan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan jejaring perdagangan lintas negara.

Tabel 2. 1.Kajian Teori Optimalisasi

No	Sumber	Teori
1	Tjiptono (2015)	Optimalisasi adalah proses untuk memaksimalkan fungsi atau peran suatu sistem atau objek agar dapat mencapai hasil paling efektif dan efisien.
2	Sutami (2020)	Optimalisasi adalah langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan kinerja suatu sumber daya atau potensi yang dimiliki agar mencapai tujuan maksimal.
3	Putra (2018)	Optimalisasi merupakan strategi untuk memperkuat fungsi suatu wilayah atau sektor melalui penguatan faktor pendukung yang relevan.

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Berdasarkan pendapat para ahli, optimalisasi dapat disimpulkan sebagai suatu proses atau upaya yang dilakukan secara sistematis dan strategis untuk memaksimalkan fungsi, peran, maupun potensi suatu objek, wilayah, atau sistem agar dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien. Optimalisasi bertujuan untuk mencapai hasil yang paling optimal, baik dari sisi manfaat, kinerja, maupun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengembangan wilayah, optimalisasi berarti pemanfaatan seluruh potensi daerah secara maksimal melalui penguatan sektor unggulan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan suatu negara atau daerah. Menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi adalah proses berkelanjutan di mana kapasitas produksi suatu perekonomian meningkat dari waktu ke waktu untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sukirno (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kegiatan ekonomi berkembang sehingga jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah, yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Simon Kuznets (1973) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya, yang didukung oleh kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan ideologi. Boediono (2001) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi jika output total meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan per kapita juga meningkat. Sementara itu, Sadono (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu.

Tabel 2. 2 Kajian Pustaka Pertumbuhan Ekonomi

No	Sumber	Teori
1	Boediono (2001)	Pertumbuhan ekonomi terjadi jika output total meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan per kapita juga meningkat
2	Todaro (2006))	Pertumbuhan ekonomi adalah proses berkelanjutan di mana kapasitas produksi suatu perekonomian meningkat dari waktu ke waktu untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa.
3	Sukirno (2013)	Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kegiatan ekonomi berkembang sehingga jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah, yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian secara berkelanjutan, yang diukur dari pertambahan output barang dan jasa, dan diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, efisiensi distribusi sumber daya, serta kebijakan ekonomi yang mendukung produktivitas dan investasi.

Menurut Boediono (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Sumber daya alam (ketersediaan dan kualitasnya)
2. Sumber daya manusia (jumlah, keterampilan, produktivitas)
3. Akumulasi modal (investasi dalam bentuk fisik dan teknologi)
4. Kemajuan teknologi
5. Kebijakan pemerintah dan stabilitas politik
6. Konektivitas dan perdagangan (termasuk perdagangan lintas batas)

2.6 Distribusi Barang

Distribusi adalah kegiatan atau proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen agar dapat digunakan dan bermanfaat. Proses ini merupakan penghubung antara aktivitas produksi dan konsumsi, serta berfungsi menciptakan nilai tambah seperti utilitas tempat, waktu, dan kepemilikan. Menurut Soekartawi (2001), distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai kepada konsumen akhir. Sejalan dengan itu, Assauri (2004) mendefinisikan distribusi sebagai kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir melalui saluran distribusi pada waktu yang tepat. Basu Swastha berpendapat bahwa distribusi merupakan saluran pemasaran yang digunakan produsen untuk mengirimkan produknya kepada industri atau konsumen, dengan melibatkan lembaga seperti produsen, distributor, dan konsumen.

Philip Kotler dan Gary Armstrong menjelaskan bahwa distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perorangan yang mengambil alih atau membantu

mengalihkan hak atas barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Senada dengan itu, Warren J. Keegan (2003) menyatakan distribusi sebagai saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang produksinya agar sampai ke pemakai industri atau konsumen. Glenn Walters (2002) menambahkan bahwa distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen yang mengombinasikan pemindahan fisik dan hak nama suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.

1. Fungsi Pemindahan Barang (Transfer of Goods)
Memindahkan barang dari tempat produksi ke lokasi di mana barang tersebut dibutuhkan konsumen.
2. Fungsi Penyimpanan (Storage)
Menyediakan fasilitas penyimpanan untuk menjaga ketersediaan barang hingga siap digunakan atau dijual.
3. Fungsi Pengelolaan Persediaan (Inventory Management)
Mengatur jumlah stok agar selalu seimbang dengan permintaan pasar, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang.
4. Fungsi Penciptaan Nilai Guna (Value Addition)
Menambah nilai barang melalui ketersediaan di tempat dan waktu yang tepat, serta kemudahan akses bagi konsumen.
5. Fungsi Informasi Pasar
Menyampaikan informasi mengenai permintaan, harga, tren, dan preferensi konsumen dari pasar kepada produsen.

Tabel 2. 3 Kajian Teori Distribusi Barang

No	Sumber	Teori
1	Soekartawi (2001)	Distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai kepada konsumen akhir
2	Warren J. Keegan (2003)	Distribusi sebagai saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang produksinya agar sampai ke pemakai industri atau konsumen.
3	Assauri (2004)	Distribusi sebagai kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir melalui saluran distribusi pada waktu yang tepat

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Berdasarkan pendapat para ahli, distribusi dapat disimpulkan sebagai serangkaian aktivitas untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir melalui saluran tertentu secara tepat waktu, sehingga produk dapat digunakan sesuai kebutuhan. Proses ini mencakup pemindahan fisik barang, pengelolaan jalur distribusi, serta pemenuhan ketersediaan barang di tempat dan waktu yang tepat, baik untuk konsumsi langsung maupun keperluan industri.

2.7 Pengembangan Wilayah

Menurut Kuncoro (2004), Pengembangan wilayah perbatasan merupakan upaya dalam mengurangi kesenjangan antara perbatasan dan wilayah lainnya.

Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta penguatan keterhubungan ekonomi dengan wilayah utama negeri. Menurut Tarigan (2006), perencanaan pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral berfokus pada sektor-sektor yang ada pada suatu wilayah, sementara pendekatan regional menitikberatkan pada pemanfaatan ruang dan interaksi antar berbagai aktivitas dalam ruang wilayah tersebut. Friedmann (1966) Pengembangan wilayah adalah upaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki distribusi sumber daya, teknologi, dan sistem ekonomi. Pengembangan wilayah dalam jargon lebih difokuskan pada pengidentifikasian potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini mencakup upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan berbagai kendala pembangunan di daerah guna mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian penting pembangunan negara secara keseluruhan. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini berdampak besar terhadap kedaulatan negara, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar, baik antar wilayah maupun negara, selain itu, wilayah perbatasan juga memengaruhi kondisi pertahanan dan keamanan, baik tingkat regional maupun nasional.

Faktor yang mempengaruhi pembangunan wilayah perbatasan meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan infrastruktur. Berikut merupakan faktor faktor.

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi Lokal dan Ekspor: Pembangunan ekonomi lokal dan orientasi ekspor memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan wilayah perbatasan. Selain itu, kebijakan nasional dan tingkat kemajuan negara tetangga turut berperan penting dalam memengaruhi dinamika geoekonomi di kawasan perbatasan.

Lingkungan Bisnis: Faktor seperti investasi, layanan kesehatan, sektor pertanian, infrastruktur jalan, transportasi memiliki dampak besar terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia serta pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan.

2. Faktor Sosial dan Demografis

Distribusi Populasi: Memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah perbatasan, karena keduanya memengaruhi dinamika masyarakat dan potensi pembangunan di wilayah tersebut. Integrasi wilayah perbatasan sering kali memiliki masyarakat dengan keragaman etnis dan budaya. Harmonisasi antar kelompok masyarakat lokal serta hubungan lintas batas negara memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat kedaulatan.

Tabel 2. 4 Kajian Teori Pengembangan Wilayah

No	Sumber	Teori
1	Kuncoro (2004)	Pengembangan wilayah perbatasan merupakan upaya dalam mengurangi kesenjangan antara perbatasan dan wilayah lainnya. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta penguatan keterhubungan ekonomi dengan wilayah utama negeri
2	Tarigan (2006)	Perbatasan sebagai fenomena yang tidak hanya fisik tetapi juga fungsional, di mana perbatasan bertindak sebagai pemisah kedaulatan negara serta berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang, barang, dan ideologi.
3	Friedmann (1966)	Pengembangan wilayah adalah upaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki distribusi sumber daya, teknologi, dan sistem ekonomi.

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

2.8 Wilayah Perbatasan

Perbatasan merupakan garis pemisah yang jelas antara dua negara atau wilayah yang menentukan batas yurisdiksi politik dan kedaulatan. Perbatasan ini biasanya terbentuk melalui kesepakatan bilateral antara negara atau bisa juga karena proses alamiah seperti sungai atau pegunungan, Prescott (1987). Menurut Glassner (1996) perbatasan sebagai fenomena yang tidak hanya fisik tetapi juga fungsional, di mana perbatasan bertindak sebagai pemisah kedaulatan negara serta berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang, barang, dan ideologi. Perbatasan bisa diartikan sebagai garis atau zona yang memisahkan kedaulatan 2 entitas politik, baik itu negara atau wilayah, dan sering kali memiliki fungsi administratif, politik, ekonomi, serta sosial. Adapun pengertian lain menurut Soekanto (2005), perbatasan merujuk pada area atau garis yang memisahkan dua wilayah dengan otoritas yang berbeda, baik itu antar negara maupun antar unit pemerintahan, dengan penegasan aturan hukum yang mengatur masing-masing wilayah. Newman dan Paasi (1998) menggarisbawahi bahwa perbatasan bukan hanya garis fisik, melainkan juga konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat untuk menegaskan identitas politik dan budaya.

Perbatasan dapat berubah mengikuti dinamika politik dan hubungan antar negara. Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan tersebut secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi yang ada di daratan, laut, dan di udara dengan negara tetangga. Penentuan luas wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara, yaitu fungsi “*security*” dan fungsi “*prosperity*” dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi lingkungan hidup di daerah melalui kajian dan observasi lapangan.

Tabel 2. 5 Fungsi Perbatasan

Guo (2005)	Van Well (2006)
Sebagai fungsi hukum, garis perbatasan secara resmi membagi wilayah berdasarkan kewenangan negara	Sebagai pembatas, perbatasan berfungsi untuk memisahkan secara tegas aspek ekonomi, administrasi, hukum, budaya, dan psikologi
Sebagai fungsi pengawasan, perbatasan berperan dalam mencatat dan memantau setiap aktivitas yang terjadi di area tersebut sebagai bentuk kendali pemerintah	Sebagai penghubung, perbatasan berperan dalam mendukung pelaksanaan program strategis dan peningkatan kapasitas
Sebagai fungsi fiskal, perbatasan terkait dengan aspek keuangan suatu negara	Sebagai batas sumber daya, perbatasan menciptakan peluang ekonomi dan politik dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah. Sebagai simbol identitas, perbatasan menjadi representasi identitas suatu wilayah, bangsa, atau negara

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Kesimpulan dari berbagai pandangan tentang perbatasan menunjukkan bahwa perbatasan tidak hanya berperan sebagai pemisah fisik antara negara atau wilayah, tetapi juga memiliki aspek fungsional dan sosial. Perbatasan berfungsi untuk mengatur arus pergerakan manusia, barang, dan ideologi antar entitas politik dan perbatasan dapat berubah sesuai dengan perkembangan politik antar negara. Perubahan perbatasan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan hubungan antarnegara. Wilayah perbatasan strategis karena mencakup kepentingan politik, sosial, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan keamanan.

Tabel 2. 6 Kajian Teori Wilayah Perbatasan

No	Sumber	Teori
1	Prescott (1987)	Perbatasan merupakan garis pemisah yang jelas antara dua negara atau wilayah yang menentukan batas yurisdiksi politik dan kedaulatan. Perbatasan ini biasanya terbentuk melalui kesepakatan bilateral antara negara atau bisa juga karena proses alamiah seperti sungai atau pegunungan
2	Glassner (1996)	Perbatasan sebagai fenomena yang tidak hanya fisik tetapi juga fungsional, di mana perbatasan bertindak sebagai pemisah kedaulatan negara serta berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang, barang, dan ideologi.
3	Menurut Soekamto (2005),	perbatasan merujuk pada area atau garis yang memisahkan dua wilayah dengan otoritas yang berbeda, baik itu antar negara maupun antar unit

No	Sumber	Teori
		pemerintahan, dengan penegasan aturan hukum yang mengatur masing-masing wilayah

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Perbatasan adalah garis atau area yang memisahkan dua wilayah dengan kekuasaan berbeda, seperti antar negara atau antar pemerintah daerah. Selain sebagai penanda wilayah, perbatasan juga berfungsi untuk mengatur pergerakan orang, barang, dan ideologi. Perbatasan bisa dibentuk melalui kesepakatan bersama antara negara atau berdasarkan kondisi alam, seperti sungai atau gunung, dengan aturan hukum yang berlaku di setiap wilayah.

2.8.1 Pengembangan Wilayah Perbatasan

Menurut Soemarno (2003) Pengembangan wilayah perbatasan melibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi kawasan perbatasan, baik dalam hal sumber daya alam maupun manusia, demi mendukung pembangunan yang berkesinambungan. Kuncoro (2004) Pengembangan wilayah perbatasan adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengelola serta menyelaraskan kawasan perbatasan, sehingga daerah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terencil, tetapi juga menjadi pintu strategis dalam hubungan internasional. Menurut Adisasmita (2006) Pengembangan wilayah perbatasan merujuk pada pendekatan strategis dalam membangun kawasan perbatasan agar menjadi wilayah yang berkembang dan produktif, dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal sekaligus memperkuat kedaulatan nasional.

Pengembangan wilayah perbatasan di Indonesia merupakan isu strategis yang melibatkan berbagai dimensi, termasuk aspek keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Wilayah perbatasan sering kali dianggap sebagai daerah yang tertinggal dan terisolasi, sehingga memerlukan kebijakan pembangunan yang inovatif dan bersifat kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut.

Pengembangan wilayah perbatasan sangat berkaitan dengan misi pembangunan nasional, seperti memastikan keutuhan dan kedaulatan wilayah, memperkuat pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Wilayah perbatasan negara mencakup kabupaten atau kota yang berbatasan langsung secara geografis dengan negara tetangga atau laut lepas. Wilayah ini terdiri atas perbatasan darat maupun laut, yang tersebar luas dengan karakteristik beragam, mulai dari daerah pedalaman hingga pulau-pulau kecil terluar yang menjadi ujung terdepan wilayah kedaulatan negara.

Pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste, memiliki peran strategis yang sangat penting. Wilayah ini berfungsi sebagai pintu gerbang negara, yang berpengaruh pada kedaulatan dan yurisdiksi nasional, baik di darat maupun di laut. Selain itu,

aktivitas di kawasan perbatasan berdampak langsung pada keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena itu, wilayah perbatasan memerlukan perhatian khusus, serta pemantauan yang konsisten terhadap perkembangannya untuk memastikan stabilitas dan pengelolaan yang optimal. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah perbatasan:

- **Kebijakan pemerintah dan pendanaan**

Kebijakan pemerintah dan pendanaan merupakan faktor kunci dalam pembangunan wilayah perbatasan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengembangan kawasan ini. Koordinasi yang terencana dan terarah antar berbagai program pembangunan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi implementasi yang terpecah-pecah dan hanya fokus pada sektor-sektor tertentu saja.

- **Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan sangat penting untuk mengurangi isolasi dan memperkuat hubungan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbatasan dalam sumber daya manusia yang terampil menjadi salah satu tantangan utama. Maka pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sangat dibutuhkan agar mereka dapat memanfaatkan dengan baik potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut.

- **Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat**

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan wilayah perbatasan, khususnya dalam sektor pariwisata. Kegiatan komunitas seperti festival perbatasan dan ekowisata, dapat meningkatkan daya tarik dan jumlah wisatawan yang berkunjung. Pemberdayaan masyarakat melalui organisasi, pemahaman kebijakan, dan penerapan yang tepat akan meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayah tersebut.

- **Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal**

Strategi untuk mengembangkan ekonomi lokal secara berkelanjutan, seperti melalui inkubator bisnis (fasilitas atau program yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan usaha baru) dan inovasi teknologi, dapat meningkatkan daya saing serta kinerja wilayah perbatasan. Selain itu, diversifikasi produk dan strategi pemasaran produk lokal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan.

- **Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan penting untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang terkoordinasi dengan kebijakan

keamanan serta, menjaga kedaulatan nasional. Integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan pertahanan di wilayah perbatasan memastikan keberlanjutan sumber daya dan stabilitas negara

Tabel 2. 7 Kajian Teori Pengembangan Wilayah Perbatasan

No	Sumber	Teori
1	Soemarno (2003)	Pengembangan wilayah perbatasan melibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi kawasan perbatasan, baik dalam hal sumber daya alam maupun manusia, demi mendukung pembangunan yang berkesinambungan.
2	Kuncoro (2004))	Pengembangan wilayah perbatasan adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengelola serta menyelaraskan kawasan perbatasan, sehingga daerah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terpencil, tetapi juga menjadi pintu strategis dalam hubungan internasional.
3	Adisasmita (2006)	Pengembangan wilayah perbatasan merujuk pada pendekatan strategis dalam membangun kawasan perbatasan agar menjadi wilayah yang berkembang dan produktif, dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal sekaligus memperkuat kedaulatan nasional

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Pengembangan wilayah perbatasan adalah upaya strategis dan terencana yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi kawasan perbatasan, baik dari segi sumber daya alam maupun manusia. Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengelola kawasan perbatasan agar tidak lagi dianggap sebagai daerah terpencil, melainkan menjadi pintu gerbang yang strategis untuk hubungan internasional serta memperkuat kedaulatan negara.

2.8.2 Ekonomi Wilayah Perbatasan

Glassner (1996) Ekonomi wilayah perbatasan adalah aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah yang berada di antara dua wilayah dengan sistem ekonomi yang berbeda. Hal ini menciptakan dinamika khusus, seperti perdagangan lintas batas dan mobilitas tenaga kerja antara negara. Kuncoro (2004) Ekonomi wilayah perbatasan adalah sistem ekonomi yang ada di daerah perbatasan yang dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Hal ini menciptakan peluang bagi wilayah tersebut untuk menjadi jalur perdagangan internasional dan pusat ekonomi regional.

David Harvey dalam teori ruang dan ekonomi wilayah mengungkapkan bahwa ruang dan lokasi geografis sangat mempengaruhi dinamika ekonomi. Dalam konteks wilayah perbatasan, pengembangan ekonomi harus mempertimbangkan faktor-faktor geografis yang mempengaruhi aksesibilitas dan interaksi dengan daerah lain. Amartya Sen berfokus pada pentingnya meningkatkan kemampuan dan kebebasan individu dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks wilayah perbatasan, pengembangan ekonomi harus

melibatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan harus dilakukan dengan pendekatan yang komperhensif, mencakup berbagai dimensi seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pandangan dari ahli tersebut memberikan

Isu pengelolaan lintas batas terdiri dari aspek, yaitu; aspek ekonomi lintas batas, aspek pengamanan dan pengawasan aspek sosial-budaya lintas batas, dan aspek sarana dan prasarana lintas batas. Permasalahan utama dalam aspek ekonomi lintas batas yaitu:

1. Perdagangan antar negara kurang efektif
2. Masyarakat wilayah perbatasan sangat bergantung dengan negara tetangga
3. Belum tersusunnya regulasi pengelolaan lintas batas yang sejalan dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 2015.

Tabel 2. 8 Kajian Teori Ekonomi Wilayah Perbatasan

No	Sumber	Teori
1	Glassner (1996).	Ekonomi wilayah perbatasan adalah aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah yang berada di antara dua wilayah dengan sistem ekonomi yang berbeda. Hal ini menciptakan dinamika khusus, seperti perdagangan lintas batas dan mobilitas tenaga kerja antara negara.
2	Kuncoro (2004)	Ekonomi wilayah perbatasan adalah sistem ekonomi yang ada di daerah perbatasan yang dipengaruhi oleh posisi geografisnya. Hal ini menciptakan peluang bagi wilayah tersebut untuk menjadi jalur perdagangan internasional dan pusat ekonomi regional

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Ekonomi wilayah perbatasan adalah aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah yang terletak di antara dua wilayah dengan sistem ekonomi yang berbeda, yang menimbulkan dinamika seperti perdagangan lintas batas dan perpindahan tenaga kerja antar negara. Posisi geografis wilayah perbatasan memberikan kesempatan bagi kawasan tersebut untuk berkembang menjadi jalur perdagangan internasional dan pusat perekonomian regional.

2.8.3 Pergerakan Barang

Menurut Ballou (1985), manajemen logistik mencakup, berbagai aktivitas yang melibatkan pergerakan dan penyimpanan barang, termasuk kegiatan terkait di titik pengumpulan dan konsumsi. Hal ini menegaskan bahwa pergerakan barang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem rantai pasokan yang lebih luas. Li (2014), menjelaskan bahwa pergerakan barang merupakan pengelolaan aliran barang yang bergerak dari titik asal hingga mencapai titik konsumsi guna memenuhi kebutuhan tertentu. Penjelasan ini menegaskan bahwa perpindahan barang merupakan elemen

penting dalam keseluruhan proses manajemen logistik. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan barang

1. Tingkat pendapatan individu atau keluarga sangat berpengaruh terhadap volume pergerakan barang. Ketika pendapatan meningkat, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan juga bertambah, yang akan mendorong peningkatan pergerakan barang.
2. Jumlah kendaraan yang dimiliki oleh suatu rumah tangga dapat memengaruhi seberapa sering dan banyak barang yang bergerak. Semakin banyak kendaraan yang tersedia, semakin besar kemungkinan terjadinya pergerakan barang.
3. Karakteristik rumah tangga, termasuk jumlah anggota dan sifat masing-masing, dapat memengaruhi kebutuhan akan pergerakan barang. Keluarga dengan lebih banyak anggota biasanya memiliki lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.
4. Kemudahan akses ke pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh terhadap pergerakan barang. Lokasi yang lebih mudah dijangkau cenderung memiliki volume pergerakan yang lebih tinggi.
5. Jarak antara tempat tinggal atau lokasi penyimpanan barang dengan pusat kegiatan ekonomi, seperti pasar atau pusat distribusi, juga berperan dalam frekuensi dan volume pergerakan.
6. Kebijakan pemerintah dan regulasi terkait perdagangan lintas batas dapat mempengaruhi arus barang. Kebijakan yang mendukung perdagangan akan mendorong peningkatan pergerakan barang.

Aksesibilitas ke pusat kegiatan ekonomi dan sosial, serta jarak ke pasar atau pusat distribusi, memainkan peran penting dalam menentukan frekuensi dan volume pergerakan barang. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait perdagangan lintas batas dapat meningkatkan arus barang jika mendukung aktivitas perdagangan.

Tabel 2. 9 Kajian Teori Pergerakan Barang

No	Sumber	Teori
1	Ballou (1985)	manajemen logistik mencakup, berbagai aktivitas yang melibatkan pergerakan dan penyimpanan barang, termasuk kegiatan terkait di titik pengumpulan dan konsumsi. Hal ini menegaskan bahwa pergerakan barang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem rantai pasokan yang lebih luas.
2	Li (2014)	logistik merupakan pengelolaan aliran barang yang bergerak dari titik asal hingga mencapai titik konsumsi guna memenuhi kebutuhan tertentu. Penjelasan ini menegaskan bahwa perpindahan barang merupakan elemen penting dalam keseluruhan proses manajemen logistik

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Manajemen logistik mencakup berbagai aktivitas penting, seperti pergerakan dan penyimpanan barang, yang mencakup pengelolaan dari titik asal hingga konsumsi. Aktivitas ini tidak hanya memastikan kebutuhan

terpenuhi, tetapi juga menegaskan bahwa pergerakan barang merupakan bagian integral dari sistem rantai pasokan secara keseluruhan. Dengan demikian, logistik memainkan peran kunci dalam menjaga efisiensi dan kesinambungan aliran barang dalam memenuhi kebutuhan pasar.

2.8.4 Perdagangan Lintas Negara

Krugman dan Obstfeld (2003) berpendapat bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara berbagai negara. Kegiatan ini muncul karena adanya perbedaan keunggulan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing negara, seperti kemampuan dalam pengelolaan sumber daya, tenaga kerja, atau teknologi. Menurut Carbaugh (2005) perdagangan lintas negara merujuk pada aktivitas pertukaran barang dan jasa yang melibatkan penduduk dari dua atau lebih negara. Aktivitas ini mencakup ekspor dan impor yang sering kali didukung oleh hubungan kerja sama ekonomi politik negara. Salvatore (2011) mengungkapkan bahwa diartikan sebagai bentuk hubungan ekonomi di mana beberapa negara terlibat dalam transaksi barang dan jasa. Interaksi ini melibatkan pergerakan uang, tenaga kerja, atau teknologi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) yang diperkenalkan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa suatu negara akan fokus memproduksi dan mengekspor barang yang dapat dibuat dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, serta mengimpor barang yang memerlukan biaya produksi lebih tinggi.

Perdagangan antarnegara memungkinkan setiap negara memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa perdagangan internasional dipengaruhi oleh perbedaan ketersediaan faktor produksi antar negara, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Negara yang memiliki kelimpahan pada faktor produksi tertentu, misalnya tenaga kerja, cenderung mengekspor barang yang memanfaatkan faktor tersebut dan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang lebih terbatas. perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memaksimalkan negara-negara untuk memaksimalkan potensi ekonominya. Setiap negara dapat memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki biaya produksi lebih rendah dibandingkan negara lain, sekaligus mengimpor barang yang lebih mahal untuk diproduksi secara lokal. Perbedaan dalam ketersediaan faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal dan sumber daya alam, menjadi dasar utama dalam menentukan pola perdagangan ini. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, negara-negara dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonominya.

Perdagangan lintas batas negara merupakan aktivitas jual beli antara penduduk dari negara berbeda di wilayah perbatasan, berdasarkan kesepakatan bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang yang tidak tersedia atau lebih terjangkau di wilayah asal, dengan faktor

lain seperti kedekatan emosional dan kemudahan administrasi. Mekanisme perdagangan ini umumnya masih tradisional, melibatkan masyarakat lokal dengan intervensi terbatas dari pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan lintas batas menurut Kurnia (2018) dan Oki (2021), meliputi aspek geografis dan topografis, tingkat aksesibilitas, perbedaan biaya serta harga, dan pengaruh latar belakang budaya maupun hubungan emosional. Kondisi ini mendorong masyarakat di kawasan perbatasan untuk lebih memilih melakukan transaksi informal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk sebilan bahan pokok dan barang lainnya, tanpa mengikuti prosedur resmi yang biasa diterapkan dalam perdagangan antarnegara.

Tabel 2. 10 Kajian Teori Perdagangan Lintas Batas

No	Sumber	Teori
1	Krugman dan Obstfeld (2003)	perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara berbagai negara. Kegiatan ini muncul karena adanya perbedaan keunggulan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing negara, seperti kemampuan dalam pengelolaan sumber daya, tenaga kerja, atau teknologi.
2	Carbaugh (2005)	Menurut Carbaugh (2005) perdagangan lintas negara merujuk pada aktivitas pertukaran barang dan jasa yang melibatkan penduduk dari dua atau lebih negara. Aktivitas ini mencakup ekspor dan impor yang sering kali didukung oleh hubungan kerja sama ekonomi politik negara.
3.	Salvatore (2011)	Salvatore (2011) mengungkapkan bahwa perdagangan lintas batas diartikan sebagai bentuk hubungan ekonomi di mana beberapa negara terlibat dalam transaksi barang dan jasa. Interaksi ini melibatkan pergerakan uang, tenaga kerja, atau teknologi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup

Sumber : Hasil Kajian Pustaka

Perdagangan lintas batas adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara, yang didorong oleh perbedaan keunggulan dalam pengelolaan sumber daya, tenaga kerja, atau teknologi. Aktivitas ini mencakup ekspor dan impor yang sering kali bergantung pada kerja sama ekonomi dan politik antarnegara. Sementara itu pengertian lain menekankan bahwa perdagangan lintas batas negara merupakan bentuk interaksi ekonomi antarnegara yang mencakup arus ruang, tenaga kerja, atau teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 11 Penelitian Terdahulu

Judul	Sasaran	Metode	Hasil
Potensi dan Hambatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste	Mengetahui potensi dan hambatan yang dihadapi dalam usaha pembangunan perekonomian.	Deskriptif kualitatif	Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste menunjukan bahwa meskipun ada potensi besar dalam perdagangan lintas batas, seperti hasil pertanian dan ternak, pembangunan ekonomi di wilayah ini masih terhambat oleh kurangnya paradigma pembangunan berkelanjutan dan ketidakjelasan rencana yang terarah. Infrastruktur seperti fasilitas perbankan di PLBN kurang memadai, menghalangi transaksi perdagangan. Komitmen pemerinrah, baik pusat maupun daerah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan perbatasan
Pengelolaan Perdagangan Lintas Batas Dalam Meningkatkan Perekonomian (Melalui Pasar Rakyat Khusus Perbatasan Mota'ain 2017 - 2019)	Mengetahui pengelolaan perdagangan lintas batas di Motaain dalam meningkatkan perekonomian	Deskripsi Kualitatif	Pasar tradisional di perbatasan Motaain, NTT, dan Timor Leste memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perdagangan lintas batas dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Kehadiran pasar tersebut membantu pertumbuhan sekonomi lokal dan mengurangi pengangguran. Namun operasionalnya, terganggu oleh pandemi, menyebabkan penutupan setelah tiga tahun
Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah	Mengidentifikasi pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan	Deskriptif kualitatif	Potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata di wilayah perbatasan masih dikelola secara tradisional, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Maka perlu adanya

Judul	Sasaran	Metode	Hasil
Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur	masyarakat du perbatasan Indonesia-Timor Leste		peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, selain itu parisipasi investor dapa menjadi pendorong dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta perlu diberdayakan agar mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun tantangan keamanan perbatasan seperti, penyelundupan barang dan pelanggaran lintas negara, perlu pengawasan ketata
Potential Regional Economic Development Strategy of Sota Border	Menganalisis pengembangan ekonomi di Perbatasan Sota	strategi potensi kawasan Deskriptif Kualitatif	Strategi pengembangan ekonomi di wilayah Sota perlu melibatkan pendekatan yang komprehensif, mengintegrasikan aspek keamanan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan akses ke lembaga keuangan mikro, menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penataan sektor-sektor unggulan sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah perbatasan ini
PLBN Aruk dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Sambas dalam Perspektif Geoekonomi	Mengkaji peran kunci pemerintah Kabupaten Sambas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pintu Gerbang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk.	Pendekatan Kualitatif	Pembangunan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas memberikan peluang ekonomi baru melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan aktivitas lintas batas. Namun, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki infrastruktur dan

Judul	Sasaran	Metode	Hasil
			menyediakan sarana yang memadai di kawasan perbatasan.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Lintas Batas Negara Indoensia-Timor Leste	Mengetahui faktor -faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan lintas batas Indonesia-Timor Leste	Deskriptif kualitatif	Faktor sumber daya alam mempengaruhi perdagangan lintas batas. Sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Belu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, dimana hasil dari sumber daya alam tersebut dimanfaatkan sebagai modal dalam melakukan perdagangan lintas batas
Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesiamalaysia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sebatik yang sejahter	SWOT	Untuk mengoptimalkan perdagangan lintas batas di Pulau Sebatik, diperlukan percepatan pembangunan sarana prasarana, peningkatan kinerja kelembagaan (KK Sosek Malindo), pembaruan regulasi hukum, serta penguatan peran aparat keamanan. Langkah-langkah tersebut bertujuan mendukung iklim perdagangan yang legal, aman, dan berdaya saing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

2.10 Variabel Penelitian

Tabel 2. 12 Variabel Penelitian

Sasaran	Metode	Teori	Variabel	
Mengetahui potensi ekonomi yang dimiliki Kota Atambua sebagai PKSN?	Metode Analisis LQ	Veransiska & Imaningsih (2021)	Peternakan Pertanian Perkebunan Perdagangan dan Jasa	
Mengidentifikasi tingkat pergerakan barang dari Atambua ke Timor Leste	Analisis Tren	Nopirin (1996), Tambunan (2004), Krugman & Obstfeld (1991), Jones (1997)	Volume barang	Menurut teori perdagangan internasional (Nopirin, 1996), volume perdagangan terjadi karena adanya perbedaan permintaan dan penawaran antara dua wilayah, yang didorong oleh variasi kebutuhan, pendapatan, serta faktor produksi
Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kegiatan perdagangan lintas batas di Kota Atambua	Metode Regresi Linier Berganda	Gravitfy Model of Trade	Permintaan dan penawaran	Teori ekonomi perdagangan menyatakan bahwa perdagangan antarwilayah

Sasaran	Metode	Teori	Variabel
			dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran barang pada masing-masing wilayah.
			Permintaan yang tinggi di satu sisi dan penawaran yang memadai di sisi lain mendorong aktivitas perdagangan lintas batas
		Infrastruktur	Infrastruktur sangat menentukan kelancaran arus barang dan jasa
		Sosial dan budaya	Hubungan sosial budaya yang erat antara masyarakat di perbatasan sering kali mempermudah interaksi dan

Sasaran	Metode	Teori	Variabel
			perdagangan lintas batas. Kebiasaan, bahasa, dan hubungan kekerabatan dapat memperkuat jaringan perdagangan dan pasar lokal
		Jenis Barang	Jenis barang yang diperdagangkan menunjukkan keunggulan faktor produksi suatu wilayah (Heckscher-Ohlin & Jones, 1997). Jika Atambua memiliki keunggulan produksi untuk komoditas tertentu, maka barang tersebut cenderung lebih banyak diekspor ke Timor Leste

Sasaran	Metode	Teori	Variabel
			<p>Harga rata-rata barang</p> <p>Harga merupakan penentu utama dalam perdagangan internasional. Soekartawi (2005) dalam telaah teori harga menjelaskan bahwa harga yang lebih tinggi di pasar global daripada pasar domestik akan mendorong meningkatnya ekspor barang</p>
Mengoptimalkan peran Kota Atambua sebagai PKSN	Analisis SOAR		